

Judul : Brin masih sulit berkomunikasi
Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 12

BRIN masih Sulit Berkolaborasi



Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

BRIN/10 (10/08/2023)

Berbagai langkah yang dilakukan BRIN, pascapelebaran berbagai lembaga riset, menjadi blunder. Pemerintah perlu menata badan riset superbody ini.

ATALYA PUSPA

atalya@mcidindonesia.com

Riset dan pengembangan (R&D) merupakan urat nadi yang mendasari pertumbuhan suatu negara, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun lainnya. Namun, data Inovasi Global Tahun 2021 mencatat, Indonesia berada pada urutan ke-14 di Asia Tenggara dan Asia Timur, serta ke-87 di dunia, turun dua peringkat dari capaian di 2020 dalam hal inovasi dan pengembangan.

Oleh karena itu, untuk kembali meningkatkan peringkat ini serta memperkuat riset dan pengembangan, diperlukan penguatan dari berbagai sektor. Namun, hingga kini, bahkan pascapembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang memegang tugas sebagai penyelenggara bidang penelitian segala bidang yang terinte-

grasi, masih belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan terhadap ekosistem riset di Indonesia.

Selama dua tahun BRIN berjalan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Ari Fahrial Syam belum melihat adanya peran lembaga itu untuk mengolah-rasikan riset yang ada di tingkat perguruan tinggi demi menghasilkan satu produk inovasi yang canggih.

"Tapi di satu sisi, kita berinteraksi dengan beberapa peneliti BRIN menjadi pengujian dan ko-promotor dari doktor yang ada. Namun, yang benar-benar dalam bentuk kolaborasi riset *outcome* produk inovasi publikasi bersama, tampaknya ini masih menunggu waktu," kata Ari.

Pada hal ini, mengakui di era inovasi ini, penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sangat membutuhkan dukungan dari pihak pe-

merintah. Ari mengusulkan perlu adanya pemberian insentif kepada perusahaan untuk turut mendukung hilirisasi produk inovasi prototype yang dihasilkan universitas.

"Jadi pemerintah silakan memberi perhatian penuh untuk mendukung pusat riset yang ada di BRIN, di sisi lain institusi pendidikan harus juga didukung," ucap dia.

Salah satu kendala yang dihadapi perguruan tinggi dalam mengembangkan riset ialah pembiayaan. Ari mengaku, sejak adanya penggabungan Kemendikbud-Ristek, perguruan tinggi banyak menerima hibah dari riset. Itu memang menjadi peluang. Tapi di sisi lain ada BRIN yang juga berjalan. Ia menilai, saat ini baik Dikti maupun BRIN masih berjalan sendiri-sendiri.

"Meskipun keduanya saling mendukung. Sekarang mungkin dalam koordinasinya masih ada kendala. Tapi seharusnya universitas yang sudah teruji pelaksanaan risetnya demi kepentingan pendidikan perlu dikembangkan," ujar dia.

Tantangan lain yang dihadapi ialah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbelakang. Menurut pengalamannya saat menempuh pendidikan master di luar negeri pada 1998, banyak negara seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswanya.

"Sementara ketika saya mengambil master, saya dibiayai World Bank. Oke, sekarang ada LPDP, walaupun terlambat, beasiswa dari pemerintah ini sangat baik untuk meningkatkan SDM, khususnya dosen dan peneliti," ucap dia.

Di lain pihak, Direktur Alih dan Sistem Audit BRIN mengungkapkan kolaborasi dilakukan BRIN dengan berbagai pihak untuk mendukung riset nasional, salah satunya dengan pihak industri. Menurut dia, industri menjadi entitas strategis bagi BRIN sebagai mitra hilirisasi produk riset dan inovasi.

"Momen ini menjadi penting karena industri adalah entitas strategis sebagai agen hilirisasi pemanfaatan dan penguasaan hasil riset dan inovasi BRIN. Industri merupakan mitra yang akan melanjutkan proses komersialisasi dari hasil-hasil riset yang dilaksanakan oleh para periset BRIN," papir Edi.

Hal ini juga merupakan upaya untuk menjadikan hasil-hasil riset menjadi produk atau layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bermanfaat untuk meningkatkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, serta mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Dari kolaborasi tersebut juga diharapkan terjadi alih teknologi yang merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di antara lembaga, badan, atau orang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Proses alih teknologi dari BRIN ke mitra industri dilakukan melalui skema lisensi yang merupakan bentuk kerja sama pemanfaatan hasil-hasil riset para periset BRIN yang telah dicatatkan sebagai kekayaan intelektual. Melalui pencatatan hasil riset sebagai kekayaan intelektual, para periset akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk perlindungan hukum, peningkatan nilai komersial, perlindungan dari pesaing, insentif untuk lebih mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, serta jaminan keamanan investasi di bidang riset.

Di sisi lain, lanjut Edi, dengan memanfaatkan layanan alih teknologi melalui lisensi yang berbasis pada kekayaan intelektual.

Dengan demikian, mitra industri dapat memangkas investasi risetnya dari segi waktu maupun biaya untuk penyediaan sumber daya manusia, bahan, peralatan, metodologi, juga data dan informasi.

Mitra industri juga akan mendapatkan manfaat dalam bentuk akses ke teknologi terbaru, pengurangan risiko dan biaya riset, peningkatan kecepatan dalam peluncuran produk baru maupun ekspansi pasar, serta sebagai pintu untuk menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan institusi riset lokal maupun global.

Melalui praktik sinergi dan kolaborasi BRIN dan mitra industri, regulator, maupun pemangku kepentingan, diharapkan dapat membangun ekosistem riset dan inovasi yang mampu membangun roda perekonomian bangsa berbasis pengetahuan.

Proyek strategis

Pro dan kontra keberadaan BRIN setelah berjalan 3 tahun lebih ternyata masih saja terjadi. Seperti yang dikemukakan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, yang menilai pemerintah perlu segera membenarkan kembali badan-badan riset yang telah dilebur ke dalam BRIN.

Ia khawatir berbagai program riset strategis nasional beserta aset-asetnya akan terbengkalai karena kurang terpelihara dan dimanfaatkan secara optimal.

Mulyanto juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya di bawah BRIN berpotensi melanggar hukum. Salah satunya program penguatan sistem peringatan dini bencana tsunami, dan BRIN menghentikan proyek tersebut.

Akibat hal itu, menurut BPK, BRIN melanggar PP No 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi serta Peringatan Dini Tsunami. Ada juga temuan di proyek pengembangan pesawat udara nirawak tipe *medium altitude long endurance* (PUNA MALL) kombatan dan pengembangan garam industri terintegrasi. Keduanya juga terhenti.

BPK menemukan BRIN tidak dapat mengelola aset negara dari lembaga-lembaga riset yang dilebur. Salah satunya pengelolaan peralatan dan mesin yang dulu dioperasikan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Secara umum BPK mengungkap 24 temuan dan 46 buah permasalahan pengelolaan anggaran dan aset di BRIN.

Hal itu, lanjut Mulyanto, semakin menegaskan bahwa konsolidasi organisasi, SDM, program dan anggaran, koordinasi, mekanisme kerja, hingga aset pascapelebaran BRIN masih belum sepenuhnya terbentuk.

"Keluhan para tokoh iptek dan para peneliti yang mengadakan soal ini ke Komisi VII DPR RI sudah lumayan banyak. Lembaga riset yang *superbody* dan sentralistik seperti BRIN ini memang sudah diduga akan susah bergerak dan menyebabkan berbagai program unggulan riset nasional bakal mandek dan terbengkalai, apalagi di tengah anggaran riset yang kecil dan terus dipangkas pemerintah," pungkasnya. (H-1)



ALTAHSA/ISTOCK/GETTY